

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian implementasi kebijakan pelayanan sosial lansia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring Kabupaten Kendal, sebagai berikut:

4.1.1 Implementasi Kebijakan Pelayanan Sosial Lansia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Cepiring Kabupaten Kendal

Implementasi kebijakan pelayanan sosial lansia di PPSLU Cepiring secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa kekurangan pada aspek tertentu. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia terdapat enam aspek dalam melaksanakan pelayanan kepada lansia, yaitu Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Jaminan Sosial, Perlindungan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial. Berikut ini merupakan penjabaran:

1. **Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual**

Pelayanan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena PPSLU Cepiring secara teratur dan

sistematis mengadakan bimbingan rohani bagi semua lansia. Pelaksanaan di lapangan mencerminkan keberlanjutan dalam memberikan hak untuk beribadah serta penguatan mental kepada para penerima manfaat melalui kegiatan keagamaan yang dilakukan bersama, sehingga peran peningkatan kualitas iman dan ketaqwaan yang diatur dalam Perda telah terpenuhi dengan baik.

2. Pelayanan Kesehatan

Aspek pelayanan kesehatan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan penyediaan layanan medis yang cepat untuk kelompok lansia. Walaupun ada kekurangan jumlah tenaga medis yang tersedia, tetap ada koordinasi yang terencana dengan fasilitas kesehatan luar (Puskesmas/Rumah Sakit), sehingga hak-hak lansia untuk menerima perawatan kesehatan serta akses ke obat-obatan tetap terjamin mengikuti standar minimal yang telah ditetapkan.

3. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan pendidikan dan pelatihan untuk orang lanjut usia telah dilakukan sesuai regulasi, namun masih dalam tahap permulaan. Aktivitas pelatihan keterampilan, seperti kerajinan, telah dilaksanakan untuk mendukung

kemampuan kognitif orang lansia. Namun, pengembangan program ini masih terkendala oleh variasi kondisi fisik para lansia dan sedikitnya pilihan materi pelatihan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengajaran yang lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing lansia.

4. Jaminan Sosial

Pelaksanaan jaminan sosial telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena pemerintah melalui PPSLU Cepiring telah memastikan semua kebutuhan dasar bagi orang tua, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal, telah terpenuhi dengan baik dan tanpa biaya. Tersedianya makanan yang terjamin sebanyak tiga kali sehari dan asrama yang aman menunjukkan bahwa peran negara dalam memberikan jaminan kehidupan bagi lansia yang tidak terawat telah dilaksanakan dengan baik.

5. Perlindungan Sosial

Aspek perlindungan sosial belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada karena masih ada hambatan dalam pemenuhan hak integrasi para lansia dengan keluarga. Meskipun pihak panti telah melakukan usaha penelusuran keluarga, kurangnya dukungan dan tanggapan dari anggota keluarga serta

pemerintah desa sering kali menjadi penghalang dalam proses perlindungan hukum dan sosial yang lebih menyeluruh bagi lansia di luar panti.

6. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial di PPSLU Cepiring telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan melalui inisiatif bimbingan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi sosial serta rasa percaya diri para lansia. Dengan adanya kegiatan kelompok dan penugasan peran kecil di lingkungan panti, para pelaksana telah berhasil menciptakan atmosfer yang mendukung, sehingga lansia tidak merasakan keterasingan dan tetap memiliki keberadaan sosial yang diakui.

Pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial bagi lansia di PPSLU Cepiring secara umum telah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana elemen pelayanan agama, kesehatan, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial menunjukkan hasil yang memuaskan berkat adanya pedoman operasional yang jelas serta kemampuan agen pelaksana yang responsif. Meskipun demikian, efektivitas layanan di bidang perlindungan sosial serta pendidikan dan pelatihan masih belum optimal dikarenakan adanya tantangan eksternal berupa minimnya dukungan dari keluarga dan keterbatasan internal terkait sumber

daya, baik dari sisi jumlah tenaga terlatih maupun anggaran yang cukup untuk fasilitas yang diperlukan.

4.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pelayanan sosial lansia di PPSLU Cepiring dipengaruhi oleh faktor keberhasilan dan hambatan yang sesuai dengan teori Edward III (1980) sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan

1. Komunikasi

Aspek ini menjadi pendukung utama karena proses transmisi informasi kebijakan dari pimpinan ke pelaksana berjalan sangat lancar dan konsisten. Para agen pelaksana selalu bekerja berdasarkan instruksi yang jelas dan adanya koordinasi rutin. Komunikasi juga berjalan dua arah, di mana pelaksana (perawat/peksos) mampu menerjemahkan kebijakan teknis ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh lansia, meskipun lansia memiliki hambatan fisik atau kognitif (pikun).

2. Disposisi Pelaksana

Aspek ini menjadi pendukung karena adanya komitmen dan sikap positif dari para pegawai di PPSLU Cepiring. Berdasarkan temuan, meskipun beban kerja tinggi dan fasilitas terbatas, para pelaksana menunjukkan dedikasi, kesabaran, dan rasa tanggung jawab yang besar dalam merawat lansia. Sikap

"melayani dengan hati" ini menjadi kekuatan internal yang menjaga kualitas pelayanan tetap stabil meskipun dukungan sumber daya lainnya minim.

Faktor Hambatan

1. Sumber Daya

Aspek ini adalah penghambat paling nyata di PPSLU Cepiring. Temuan di lapangan menunjukkan adanya keterbatasan anggaran yang menyebabkan sarana prasarana (gedung, kamar mandi, alat kesehatan) banyak yang rusak atau tidak memadai. Selain itu, kuantitas SDM (jumlah perawat dan pekerja sosial) tidak sebanding dengan jumlah lansia yang dilayani (rasio tidak ideal), sehingga pelayanan menjadi kurang maksimal secara personal.

2. Struktur Birokrasi

Meskipun sudah ada SOP, aspek ini menjadi penghambat pada bagian Fragmentasi atau pembagian koordinasi yang kaku. Struktur birokrasi di panti cenderung sangat formal dan hierarkis, yang terkadang membuat pengambilan keputusan cepat di lapangan menjadi terhambat oleh alur birokrasi yang panjang. Selain itu, tata letak gedung yang berjauhan menjadi kendala fisik dalam koordinasi antar unit kerja secara cepat.

Berdasarkan analisis temuan implementasi kebijakan pelayanan sosial lansia di PPSLU Cepiring dengan menggunakan

teori Edward III (1980), pelayanan sosial lansia di PPSLU Cepiring didukung secara optimal oleh aspek Komunikasi yang berjalan melalui transmisi informasi yang jelas dan konsisten, serta aspek Disposisi internal yang ditunjukkan oleh komitmen serta dedikasi tinggi para staf dalam melayani lansia. Sebaliknya, efektivitas pelayanan tersebut masih terhambat oleh aspek Sumber Daya akibat keterbatasan anggaran dan fasilitas sarana prasarana yang belum memadai, serta aspek Struktur Birokrasi yang mengalami kendala fragmentasi berupa koordinasi yang kaku, alur pengambilan keputusan yang panjang akibat struktur hierarkis yang formal, dan hambatan fisik berupa tata letak gedung yang berjauhan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. a. Kepala PPSLU Cepiring guna mengatasi keterbatasan pada aspek sumber daya perlu melakukan:
 - Merencanakan jumlah tenaga kerja dan pelatihan keterampilan profesional.
 - Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran operasional PPSLU Cepiring, khususnya untuk renovasi fasilitas gedung, obat-obatan, dan kegiatan stimulasi fisik- psikososial.

- Mengoptimalkan kerja sama dengan perguruan tinggi (mahasiswa sosial/keperawatan) sebagai salah satu solusi penambahan tenaga tanpa beban anggaran besar.

b. Untuk mengatasi keterbatasan pada aspek struktur birokrasi perlu melakukan:

- Mengusulkan penguatan koordinasi antar lembaga antara PPSLU Cepiring, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait, dengan menyepakati alur komunikasi dan mekanisme kolaborasi yang jelas sehingga mendukung pengambilan keputusan yang cepat tanpa mengabaikan kewenangan wilayah.
- Mengusulkan penyusunan SOP spesifik yang mengatur rasio pekerja terhadap penghuni serta standar pelatihan dan pengembangan kompetensi staf sehingga struktur birokrasi menjadi lebih terstandar dan responsif terhadap kebutuhan lansia.

2. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada ruang lingkup metodologis yang bersifat kualitatif-deskriptif, sehingga temuan yang dihasilkan masih

terbatas pada gambaran proses implementasi kebijakan secara administratif dan prosedural. Fokus penelitian belum menjangkau pengukuran dampak secara statistik terhadap penerima manfaat langsung, yakni para lansia di PPSLU Cepiring.

Berangkat dari keterbatasan tersebut, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengadopsi pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* guna mengukur efektivitas kebijakan secara lebih presisi. Penelitian masa depan dapat menggunakan instrumen terstandarisasi seperti WHOQOL- OLD (*World Health Organization Quality of Life - Older Adults*) untuk membedah pengaruh nyata pelayanan panti terhadap enam dimensi kualitas hidup lansia, termasuk otonomi dan keterlibatan sosial. Penggunaan analisis statistik akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsep pelayanan mana yang paling signifikan berkontribusi terhadap kesejahteraan lansia.